

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jeddawi, Mutir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Kreasi Total Media.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achamd MH, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Cet III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sarundajang, 2011, *Arus Balik Kekuasaan Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Siswanto Sunarno, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet V, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. 1985, *Pengantar Hukum Administrai Negara Indonesia*. Jakarta, Balai Buku Ichtiar.

Undang-undang

- R.I., Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang "Pemerintahan Daerah".
- R.I., Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang "Pembentukan Undang-Undang Mengenai Pembentukan Peraturan Daerah".
- R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang "Satuan Polisi Pamong Praja".
- R.I., Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2016 tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis".
- R.I., Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang "Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau".
- R.I., Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang "Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis".

Internet

Anonim, Polisi Pamong Praja, 24 Januari 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja, diakses pada Jumat 8 Desember 2017 pukul 15.02 WIB.

Anonim, Pemerintahan daerah, 29 Juli 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, diakses pada Jumat 8 Desember 2017 Pukul 17.00 WIB

Jurnal

Amri, R. K., & Harsasto, P. “Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)”, *Journal of Politic and Government Studies, Universitas Diponegoro*, II (April, 2017).

Hamidi, J. “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia*, III (Juli, 2011)

Jaka Riestya Putra. “Pelaksanaan tugas satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis di provinsi daerah istimewa yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta*, (Juni, 2017)

Riduansyah, M. “Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor).” *Jurnal Universitas Indonesia*, X (2010)

Saharuddin, S. H., Wahyuni Safitri, S. H., & Hum, M. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda”. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, VI (Januari, 2017).

Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri”, *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, II (2005).

Susiyani, H. “Fungsi Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban Pkl di Bandar Lampung)”. *Jurnal Fakultas Hukum UNILA*, X (Maret 2017).

- Syafii, I., Linggi. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, VI (2018).
- Umniati, G., & AKBAL, M. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare”, *Jurnal Tomalebbi*, IV (Desember, 2016).
- Warsita, I. A. “Efektifitas penegakan hukum pelanggaran perda nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol terhadap pelanggaran peredaran minuman keras di kabupaten Sleman”, *Jurnal UAJY*, (Mei, 2013).

Tesis

- Amboro, F. (2013). “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta Tahun 2012” (Doctoral Dissertation, Fisipol Umy).
- Budihardjo, E (2016). “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penegakkan Peraturan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).” Skripsi Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Haji Tanjung Pinang.
- Naafi’i, S. (2013). “Konflik Peran Pada ANGGOTA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.”, Skripsi Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
- Ulfa, N. (2014). “Peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum (studi penertiban reklame di kota pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).”